

Solmadapar: DPRD Kalbar Mandul

PONTIANAK. Sekelompok massa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pengemban Aspirasi Rakyat (Solmadapar) berunjuk rasa di DPRD Kalbar, menuntut aparat penegak hukum mengambil langkah atas temuan BPK yang terkesan diabaikan pemerintah provinsi, Selasa (4/9).

Pansus DPRD Kalbar yang sudah dibentuk untuk memantau Pemprov dalam penyempurnaan temuan dianggap mandul. Mahasiswa menilai, lebih baik Pansus dibubarkan, daripada membuang sia-sia uang rakyat.

"Berdasar temuan audit BPK Perwakilan Kalbar untuk anggaran 2010 ditemukan beberapa kegagalan pada aset dan munculnya anggaran siluman. Jumlah kebocoran mencapai Rp156 miliar. Sangat besar uang yang tidak jelas pengalokasiannya dan terindikasi dikorupsi," kata, Supito, juru bicara Solmadapar.

Solmadapar menginginkan aparat penegak hukum turutan menindaklanjuti hasil temuan audit BPK. Supaya alokasi keuangan negara kedepan tidak dipersalahkan. Melainkan sepenuhnya diperuntukkan untuk



Gedung DPRD Kalbar. SYAMSUL ARIFIN

kepentingan rakyat.

Solmadapar juga menyayangkan sikap DPRD Kalbar yang terkesan lemah mengawasi kinerja eksekutif Kalbar. Padahal temuan BPK merekomendasikan agar segera dilakukan perbaikan. Walau DPRD telah membentuk Pansus untuk masalah tersebut,

tapi kinerjanya tidak tampak. "Lebih baik Pansus dibubarkan. Pansus Mandul," kata Supito.

Ketua DPRD Kalbar ikut dipertanyakan menyikapi temuan BPK di sejumlah SKPD Pemprov Kalbar. Solmadapar mendesak Minsen SH mundur menjadi Ketua DPRD Kalbar, kalau tidak mampu me-

nyelesaikan permasalahan temuan audit BPK. Begitu juga dengan anggota DPRD lainnya, lebih baik menjadi masyarakat biasa, daripada menjadi wakil rakyat, tapi tidak membela rakyat.

"Tim Pansus DPRD Kalbar dan aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah. Jangan hanya makan gaji buta dan menunggu perintah. Pemprov juga harus segera menindaklanjuti hasil audit BPK secara objektif dan profesional. Kami tegaskan kepada Gubernur mengambil sikap tegas bila jajarannya terbukti terlibat dalam penyalahgunaan anggaran," tegas Supito.

Demo Solmadapar di Gedung DPRD Kalbar mendapat pengawasan ketat aparat keamanan. Sejak bergerak dari bundaran Digulis Universitas Tanjungpura hingga tiba ke lokasi aksi.

Wakil Gubernur Kalbar Christiandy Sanjaya sedang menggelar rapat bersama legislatif di gedung DPRD ketika Solmadapar berunjukrasa. Kendati demikian tidak ada yang menerima unjuk rasa tersebut. Hingga pengunjuk rasa membubarkan diri dengan tertib. (sul)